



E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

Judul : DPR Nilai Pengawasan Terhadap Orang Asing Lemah
Tanggal : Senin, 26 Desember 2016
Surat Kabar : Republika
Halaman : -

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, --Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo menilai, makin maraknya pekerja ilegal asing di Indonesia disebabkan karena lemahnya fungsi pengawasan terhadap orang asing oleh aparat kepolisian. Selain itu, POA atau Pengawasan Orang Asing oleh pihak kepolisian tidak diberlakukan lagi. Menurut Firman, akhir-akhir ini masyarakat dihebohkan dengan maraknya berita di media sosial (medsos) tentang masuknya tenaga kerja asing ilegal, khususnya dari Cina. Ia menyakini, hal ini bukanlah berita isapan jempol belaka. Namun, berita itu perlu dijadikan bahan evaluasi oleh pihak pemerintah. Artinya, kata dia, dengan adanya pemberitaan ini, bangsa Indonesia harus waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan lainnya. "Dan apa saja bisa terjadi dengan makin banyaknya dan maraknya pekerja ilegal dari Cina itu," kata Firman, dalam siaran persnya, Senin (26/12). Firman menyatakan, ada regulasi yang salah selama ini, khususnya saat tidak diberlakukannya atau dilepaskannya sistem POA oleh kepolisian. Sehingga, sistem pemantauan dan pengawasan terhadap orang asing yang ada di Indonesia makin lemah. Menurutnya, sejak masih diberlakukannya proses pengawasan orang asing oleh Polri di Indonesia, sangat mudah memantau orang asing yang lalu lalang di dalam negeri. Apalagi, Polri memiliki anggota hingga di tingkat kecamatan dan kelurahan. Oleh karena itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR tersebut meminta, pemerintah mendengarkan dan mencermati pemberitaan itu secara positif. Hal ini untuk dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang selama ini telah dikeluarkan seperti dibebaskannya membuat lembaga atau LSM bagi WNA di Indonesia. "Tentang penyelundupan tenaga kerja ke suatu negara bukan hal baru dan hampir di pelosok negara terjadi. Hal yang sama terjadi seperti di Eropa dan Amerika juga masih ada," ujarnya.